

Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kediri

M. ANAS

Magister Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Achmad Dahlan 76
Kediri, Indonesia
anas@unpkediri.ac.id and mohamadanas066@gmail.com

Rr. FORIJATI

Magister Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Achmad Dahlan 76
Kediri, Indonesia
forijati@unpkediri.ac.id and rr.fori@unpkediri.ac.id

DIAN LIANAWATI

Magister Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Achmad Dahlan 76
Kediri, Indonesia
dianliana21@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and test the elements of the internal control system consisting of control environment, risk control, control activities, information and communication, and monitoring of the accountability of the management of the Village Budget (APB Desa) in Kediri Regency. The data in this study are primary data obtained through a research instrument in the form of a questionnaire developed based on indicators on each element of the internal control system. The population of this research is in the form of villages in Kediri Regency with a total of 343 villages, while the sample of this study was determined that 103 villages were selected randomly (random sampling). Data analysis to test the research hypothesis was carried out with multiple linear regression models with the SPSS version-23 application. The results of the study state that empirically the control environment and control activities partially have a positive and significant effect on increasing the accountability of APB Desa management in Kediri Regency, while risk assessment, information and communication, and partial monitoring have no significant effect on increasing the accountability of APB Desa management in Kediri Regency. Simultaneously all elements of the internal control system have a positive and significant effect on increasing the accountability of APB Desa management in Kediri Regency.

Keywords: Internal Control Systems, Accountability, Village Budget

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menguji elemen-elemen sistem pendendalian internal yang terdiri atas lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring atas akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten Kediri. Data dalam penelitian ini berupa data primer yang peroleh melalui instrument penelitian berupa kuesioner yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator pada masing-masing elemen sistem pengendalian internal. Populasi penelitian ini berupa desa yang terdapat di Kabupaten Kediri sejumlah 343 desa, adapun sampel penelitian ini ditentukan sebanyak 103 desa yang dipilih secara acak (random sampling). Analisis data untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS Versi-23. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara empiris lingkungan pengendalian, dan aktivitas pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri, sedangkan penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan monitoring secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri. Secara simultan semua elemen sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, APB Desa

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka desa memiliki otonomi yang cukup luas dalam mengatur tata kehidupan desa dalam aspek pemerintahan, pembangunan, keuangan, maupun pemberdayaan masyarakat. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dimanifestasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan harus didasarkan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas diartikan sebagai suatu kewajiban pihak yang diberikan amanah kepada pihak yang memberikan amanah secara bertanggung jawab dengan memenuhi segala ketentuan yang telah diberikan oleh pemberi amanah. Dalam konteks pengelolaan APB Desa akuntabilitas dapat dijelaskan bahwa penerima amanah dalam hal ini pemerintah desa berkewajiban melaksanakan pengelolaan APB Desa secara bertanggung jawab agar sesuai dengan harapan sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk peran pemerintah desa dalam memerikan layanan kepada masyarakat. Layanan kepada masyarakat tersebut dilakkan dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dalam arti memberikan informasi keuangan secara terbuka dan dapat diakses serta memberikan pengawasan atas semua tahap kegiatan dalam pengelolaan APB Desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APB Desa dapat dicapai melalui suatu sistem pengendalian internal atas semua aspek yang ada, baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pelaporan APB Desa. sistem pengendalian internal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dimana fungsi sistem pengendalian internal sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Aziz, Rahman, Alam, & Said, 2015).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan, secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa. Penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Karlinayani & Ningsih, 2018), (Yudianto & Sugiarti, 2017), dan (Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017) membuktikan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya akuntabilitas terhadap pengelola keuangan desa juga telah terbukti secara empiris melalui beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017), (Pujiono, Sukarno, & Puspitasari, 2016), (Rahmawati, 2018), (Wida, Supatmoko, & Kurrohman, 2017), (Martini, 2019), dan (Kawedar, Handayani, & Purwanto, 2019). Hasil penelitian menyatakan bahwa tata kelola keuangan desa yang baik salah satunya dipengaruhi oleh efektifitas pengendalian internal.

Namun demikian beberapa penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dan lebih menjelaskan secara deskriptif akan pentingnya sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Disamping itu, sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian yang bersifat analisis untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya antara lain bahwa dalam penelitian ini: 1) Variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian ini diadopsi dari elemen sistem pengendalian internal sebagaimana dirumuskan oleh COSO (Moeller, 2013) dengan instrument yang dikembangkan oleh peneliti; 2) Lingkup pengelola keuangan desa meliputi pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri; dan 3) Pengukuran variabel akuntabilitas pengelolaan APB Desa dalam penelitian ini digunakan lima indikator, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas

Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal (2) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari pemegang amanah suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya dalam menjalankan misi entitas yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Stanbury, 2003). Pertanggungjawaban ini lazimnya dituangkan dalam suatu media tertentu dan dilakukan secara periodik.

Desa, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki otonomi dan kewenangan yang besar dalam pengelolaan pemerintahan maupun keuangan. Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. *Stewardship theory* menyatakan bahwa manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukanlah diorientasikan pada kepentingan individu melainkan untuk mencapai tujuan entitas yang telah ditetapkan (Davis, David Schoorman, Donaldson, Albanese Tina Dacin Ira C Harris Davis, & Reply, 1997). Teori ini pada mulanya digunakan untuk menganalisis fenomena organisasi sector swasta, namun dalam perkembangannya teori pengelolaan (*Stewardship theory*) juga diimplementasikan pada organisasi sektor publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan desa implikasi teori ini menyatakan bahwa tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan, memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa.

Sebagai pejabat publik pimpinan desa selaku pengelola APB Desa mereka dituntut untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa. Pengelola APB Desa memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjawab, dan mengkomunikasikan kinerja dan tindakan pengelolaan APB Desa kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas sebagaimana dikatakan (Moedarlis, 2016) merupakan sebuah bentuk kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Salah satu media yang lazim digunakan untuk menyampaikan bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya dalam semua aspek sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek akuntabilitas terdiri atas tiga jenis yakni: a) akuntabilitas keuangan: berupa pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/ penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran; b) akuntabilitas manfaat: merupakan pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas; dan c) akuntabilitas prosedural: merupakan pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan definisi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa berfungsi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan. Karena jabatannya, sekretaris desa ditetapkan menjadi kordinator PPKD.

Proses Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari; (1) Perencanaan (RKPDesa), yakni keselarasan perencanaan, tingkat partisipasi dan kualitas RKP Desa; (2) Penganggaran, terdiri dari: Unifikasi dan integrasi Anggaran, Harmonisasi Kades & BPD, Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan; (3) Pelaksanaan, terdiri dari: Pengadaan B/J, Kewajiban Perpajakan, Kades "Powerfull"; (4) Penatausahaan, terdiri dari: Administrasi pembukuan, cara peng-SPJ-an, Pencatatan kekayaan desa, Konsep "Belanja Modal & Belanja Barang"; (5) Pelaporan & Pertanggungjawaban, terdiri dari Jumlah laporan yang harus dibuat dan tata cara pelaporan; (6) Pengawasan, meliputi efektifitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan (BPKP, 2016)

APB Desa merupakan salah satu alat perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018). APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa merupakan manifestasi dari otonomi pemerintahan desa. Begitu besar peran yang diterima desa yang tentunya harus disertai tanggung jawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana setiap akhir kegiatan atau periode akuntansi harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi yang membentuk seluruh unsur dalam sistem pengendalian internal. Beberapa komponen yang membentuk lingkungan pengendalian meliputi: integritas dan nilai etika; komitmen pada kompetensi; filosofi dan gaya kepemimpinan; struktur organisasi; pembagian kewenangan dan tanggung jawab; kebijakan dan prosedur sumber daya manusia; serta kelompok pengawas. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa lingkungan pengendalian merupakan suatu etos dan cara organisasi beroperasi yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun yang terlibat dalam suatu organisasi (Jokipii, 2010). Dengan demikian, kuatnya efektivitas lingkungan pengendalian dalam suatu sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri

Pengaruh penilaian risiko terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa

Sistem pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi oleh suatu unit organisasi baik risiko yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Penilaian risiko harus dilakukan karena setiap organisasi memiliki risiko dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ishak, Nor, Shuib, Osman, & Saad, 2019). Penilaian atas risiko yang dilakukan secara cermat akan lebih efektif dan dapat memberikan gambaran terhadap besaran risiko yang dihadapi oleh suatu entitas. Pimpinan entitas perlu mengelola risiko dengan sebaik-baiknya sehingga hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan entitas dapat dieliminir atau paling tidak dapat dikurangi. Dengan demikian penilaian resiko yang efektif diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa. Atas dasar argumen tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Penilaian risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri.

Pengaruh kegiatan pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa

Pimpinan suatu entitas memiliki tugas dan tanggung jawab agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Upaya untuk merealisasikan tujuan organisasi tersebut dapat dilakukan dengan mengkoordinir dan menggerakkan semua sumberdaya yang dimiliki organisasi. Dalam kaitannya dengan memberdayakan semua yang terlibat dalam organisasi, maka kegiatan pengendalian yang merupakan tindakan yang membantu untuk memastikan arahan manajemen dalam rangka mengurangi risiko selama proses pencapaian tujuan organisasi (Moeller, 2013). Kegiatan pengendalian dalam suatu sistem pengendalian internal sebaiknya tersebar di semua tingkatan organisasi, baik formal maupun informal, bidang keuangan maupun non keuangan, baik kuantitatif maupun kualitatif (Ishak et al., 2019). Dalam konteks organisasi pemerintahan desa, kegiatan pengendalian dirancang untuk memberikan jaminan bahwa proses pemerintahan dapat berjalan seperti diharapkan dan dapat mencapai tujuan yang dirumuskan. Oleh karena itu efektivitas kegiatan pengendalian diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Muraleetharan, 2011) membuktikan bahwa kegiatan pengendalian memiliki dampak positif terhadap kinerja organisasi pemerintah dan swasta di Distrik Jaffna, Sri Lanka. Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri.

Pengaruh informasi dan komunikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa

Informasi yang akurat dan komunikasi memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Rija & Ernesto Rubino, 2018). Sistem komunikasi yang didesain dan diimplementasikan dalam suatu entitas akan menentukan kekuatan informasi yang dilaporkan, para pihak yang memerlukan dan mendapatkan informasi, dan penggunaan informasi untuk keperluan pengendalian (Moeller, 2013). Informasi dan komunikasi yang efektif memungkinkan entitas untuk berbagi atau menyampaikan berbagai hal terkait dengan pengetahuan yang relevan dan berkualitas kepada *stakeholders*. Dengan demikian para pihak termasuk anggota organisasi yang sering berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) atau informasi diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Informasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri.

Pengaruh monitoring terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa

Sistem pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan dalam entitas untuk jangka waktu yang fleksibel sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam suatu entitas. Namun demikian, manajemen perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang sedang diterapkan saat ini masih relevan dan mampu mengatasi risiko yang timbul, baik risiko yang berasal dari intern maupun dari ekstern entitas. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur yang efektif dan dapat berfungsi dengan baik. Prosedur yang efektif dan berfungsi dengan baik akan memberikan dampak yang lebih memadai guna mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal baik yang baru atau yang diperbarui (Moeller, 2013).

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pemantauan pengendalian perlu dilakukan dalam rangka evaluasi kualitas kinerja pengendalian yang telah diimplementasikan dari waktu ke waktu. Manfaat lain adanya pemantauan pengendalian adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan (audit) dan rewiw lainnya dapat segera ditindaklanjuti sehingga tujuan organisasi yang ditetapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian, efektivitas pemantauan pengendalian dapat memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa. Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Monitoring berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan indikator-indikator dalam setiap variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas desa-desa dalam wilayah Kabupaten Kediri sejumlah 343 desa. Sedangkan sampel penelitian ditentukan secara acak (*random sampling*) sebesar 30% dari jumlah desa, yaitu sebanyak 103 desa yang tersebar di 26 kecamatan. Responden penelitian ini merupakan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan APB Desa pada masing-masing desa.

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yang merupakan unsur-unsur sistem pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), kegiatan pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), dan pemantauan pengendalian (X5). Adapun variabel dependen terdiri satu variabel, yaitu akuntabilitas.

Pengukuran variabel lingkungan pengendalian (X1) mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suasana dalam suatu entitas yang memungkinkan anggota entitas melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab dalam mengelola APB Desa. Variabel ini diukur dengan enam indikator, meliputi: aturan perilaku, standar kompetensi, mempertimbangkan risiko, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, kesesuaian struktur organisasi, dan kebijakan pencapaian tujuan instansi (Kawedar et al., 2019).

Penilaian risiko (X2) merupakan tindakan pengendalian internal melalui penilaian risiko atas kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan APB Desa. Variabel ini diukur dengan menggunakan empat indikator,

meliputi: tujuan organisasi sesuai dengan rencana strategis, identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan risiko (Kawedar et al., 2019)

Kegiatan pengendalian (X3) merupakan tindakan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan terkait dengan pengelolaan APB Desa. Kegiatan pengendalian ini ditujukan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh semua yang terlibat dalam pengelolaan APB Desa. Variabel ini diukur dengan 10 indikator, meliputi: review kinerja, pembinaan SDM, kebijakan pengamanan asset, review ukuran kinerja, pengendalian sistem informasi, pemisahan tugas dan fungsi, pencatatan yang akurat, otorisasi transaksi, pembatasan akses, dan dokumentasi (Kawedar et al., 2019).

Informasi dan komunikasi (X4) merupakan tindakan yang dilakukan oleh penanggung jawab maupun pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APB Desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan dan hasil pelaksanaan APB Desa serta informasi penting lainnya secara efektif kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Variabel ini diukur dengan tiga indikator, meliputi: informasi pencapaian kinerja, komunikasi yang efektif, dan penyampaian informasi penting kepada pegawai (Kawedar et al., 2019).

Pemantauan pengendalian (X5) merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh penanggung jawab dan semua pelaksana kegiatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan APB Desa dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan (audit) dan review lainnya atas pelaksanaan APB Desa ditindaklanjuti. Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, meliputi: strategi pemantauan berkelanjutan, evaluasi pengendalian internal, dan mekanisme tindak lanjut temuan audit/review (Kawedar et al., 2019).

Akuntabilitas (Y) merupakan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dimanifestasikan dalam APB Desa serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan, dalam hal ini pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Variabel akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan lima indikator, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018)

Analisis data dalam penelitian ini mencakup: statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis penelitian. Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian terhadap kualitas data. Uji kualitas data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji kualitas data dilakukan sebelum data diolah. Tujuan dilakukannya uji kualitas data adalah untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar valid dan reliabel.

HASIL PENELITIAN

Uji Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Oleh karenanya perlu dipastikan bahwa data tersebut berkualitas agar layak dijadikan data penelitian. Menurut (Ghozali, 2015) guna memastikan bahwa data penelitian berkualitas perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas atas data yang didapatkan. Hasil pengujian reliabilitas tampak pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Signifikansi	Keterangan
Lingkungan (X1)	0,838	0,05	Reliabel
Risiko (X2)	0,583	0,05	Reliabel
Aktivitas (X3)	0,652	0,05	Reliabel
Infokom (X4)	0,561	0,05	Reliabel
Monitoring (X5)	0,703	0,05	Reliabel
Akuntabilitas (Y)	0,843	0,05	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua kuesioner yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian semua item kuesioner pada setiap variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Adapun hasil pengujian validitas sebagaimana disajikan pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua item kuesioner dalam setiap variabel penelitian menghasilkan nilai lebih besar dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa semua item kuesioner dalam penelitian ini valid.

Tabel 2
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Kuesioner	Nilai Pearson Correlation	Signifikansi	Keterangan
Lingkungan Pengendalian (X1)	X1.1	0,769	0,05	Valid
	X1.2	0,836	0,05	Valid
	X1.3	0,719	0,05	Valid
	X1.4	0,820	0,05	Valid
	X1.5	0,560	0,05	Valid
	X1.6	0,780	0,05	Valid
Penaksiran Risiko (X2)	X.2.1	0,652	0,05	Valid
	X.2.2	0,663	0,05	Valid
	X.2.3	0,553	0,05	Valid
	X.2.4	0,793	0,05	Valid
Aktivitas Pengendalian (X3)	X.3.1	0,531	0,05	Valid
	X.3.2	0,585	0,05	Valid
	X.3.3	0,530	0,05	Valid
	X.3.4	0,494	0,05	Valid
	X.3.5	0,467	0,05	Valid
	X.3.6	0,450	0,05	Valid
	X.3.7	5,503	0,05	Valid
	X.3.8	0,376	0,05	Valid
	X.3.9	0,608	0,05	Valid
	X.3.10	0,442	0,05	Valid
Informasi dan Komunikasi (X4)	X.4.1	0,732	0,05	Valid
	X.4.2	0,766	0,05	Valid
	X.4.3	0,745	0,05	Valid
Monitoring (X4)	X.5.1	0,725	0,05	Valid
	X.5.2	0,831	0,05	Valid
	X.5.3	0,825	0,05	Valid
Akuntabilitas (X4)	Y.1	0,717	0,05	Valid
	Y.2	0,751	0,05	Valid
	Y.3	0,738	0,05	Valid
	Y.4	0,610	0,05	Valid
	Y.5	0,611	0,05	Valid
	Y.6	0,647	0,05	Valid
	Y.7	0,579	0,05	Valid
	Y.8	0,674	0,05	Valid
	Y.9	0,620	0,05	Valid
	Y.10	0,656	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS), yang menghasilkan *Asymp.Sig. (2-tailed)* 0,095 yang berarti lebih besar dari 0,05; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel berdistribusi normal. Adapun uji homogenitas dilakukan dengan *Test of Homogeneity of Variances*, yang menghasilkan angka lebih besar dari 0,05 untuk semua variabel. Ini berarti bahwa semua variabel penelitian merupakan variabel yang homogen. Hasil uji multikolinieritas menghasilkan nilai *inflation factor* (VIF) lebih kecil dari 5. Dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas dalam data penelitian. Pada uji

heteroskedastisitas dihasilkan nilai koefisien t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 1,9837 pada $df-2 = 101$, dengan probabilitas 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,844. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) = 103 dan jumlah variabel independen (k) = 5 menghasilkan nilai dL sebesar 1,575 dan dU sebesar 1,780. Oleh karena nilai DW terletak antara dU dan ($4-dU$), berarti tidak terdapat autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis secara simultan dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji F dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 23. Hasil uji F disajikan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	986.142	5	197.228	14.432	.000 ^b
	Residual	1325.567	97	13.666		
	Total	2311.709	102			

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 14,432 dengan signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel (2,31). Sedangkan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang terdiri atas: lingkungan pendendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas.

Uji Parsial (Uji t) dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas: lingkungan pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), aktivitas pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), dan monitoring (X5) terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas (Y). Hasil uji t dengan menggunakan SPSS Versi 23 tampak pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Parsial (Uji t)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.808	3.972		1.462	.147
	LINGKUNGAN	.316	.136	.231	2.312	.023
	RISIKO	.216	.224	.096	.965	.337
	AKTIVITAS	.395	.112	.344	3.524	.001
	INFOKOM	.420	.282	.142	1.493	.139
	MONITORING	.136	.244	.051	.560	.577

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai sig. variabel lingkungan pengendalian (0,023) lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas. Adapun variabel risiko pengendalian menunjukkan nilai sig. 0,337. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian variabel penilaian risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas. Selanjutnya pada variabel aktivitas pengendalian menunjukkan nilai sig. sebesar 0,001 dan ini lebih kecil dari 0,05. Ini berarti variabel aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas. Pada variabel informasi dan komunikasi, angka sig. sebesar 0,139 dan ini lebih besar dari 0,05, berarti variabel informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas. Demikian hal dengan variabel monitoring. Variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas, karena angka sig. sebesar 0,577 lebih besar daripada 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Goodness of Fit* dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 23. Hasil Uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 ^a	.427	.397	3.697

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 5 menunjukkan nilai *Adjusted Square* sebesar 0,397. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel independen yang terdiri atas: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi memberikan kontribusi pengaruhnya terhadap variabel akuntabilitas sebesar 0,397 atau 39,7%. Dengan demikian variabel akuntabilitas sebesar 60,3% dipengaruhi oleh selain dari lima variabel tersebut.

Model Regresi

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas pengelolaan APB Desa (AKUNTABILITAS)

a = Konstanta

b1-b5 = koefisien regresi variabel X1 – X5

X1 = Lingkungan pengendalian (LINGKUNGAN)

X2 = Penilaian risiko (RISIKO)

X3 = Aktivitas pengendalian (AKTIVITAS)

X4 = Informasi dan komunikasi (INFOKOM)

X5 = Monitoring (MONITORING)

e = *Residual variable*

Berdasarkan tabel 4, maka model regresi dalam rangka menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diformulasikan dengan model persamaan regresi linier berganda berikut:

$$\text{AKUNTABILITAS} = 5,808 + 0,316 \text{ LINGKUNGAN} + 0,216 \text{ RISIKO} + 0,395 \text{ AKTIVITAS} + 0,420 \text{ INFOKOM} + 0,136 \text{ MONITORING} + e$$

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama penelitian ini dinyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil uji data pada tabel 3 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,312 yang berarti lebih besar dari t tabel (1,6598) dan tingkat signifikansi 0,023 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan lingkungan pengendalian terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri didukung data empiris. Lingkungan kerja yang kondusif mampu memberikan dorongan bagi pengelola APB Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APB Desa. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif maka perangkat desa terutama kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa dapat melaksanakan beberapa program kegiatan seperti menyusun standar kode etik, menyusun struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan tegas untuk menghindari tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi dalam pengelolaan keuangan desa, menentukan standar kompetensi untuk setiap fungsi, dan memberikan teladan kepemimpinan dengan dedikasi dan integritas yang baik. Hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian (Al-Thuneibat, Al-Rehaily, & Basodan, 2015), (Azlina & Amelia, 2015), (Pujiono et al., 2016), dan (Kawedar, Handayani, & Purwanto, 2019).

Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penilaian risiko berpengaruh positif dan signifikan dalam penelitian ini tidak didukung dengan data empiris. Hasil pengujian secara empiris menunjukkan bahwa nilai

t hitung sebesar 0,965 dan signifikansi sebesar 0,337. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari nilai t tabel (1,6598) dengan signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko meskipun memiliki sifat hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian ini mengonfirmasi beberapa penelitian (Kawedar, Handayani, & Purwanto, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa penilaian risiko tidak mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri karena adanya keterbatasan bawaan yang melekat pada sistem pengendalian internal itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan (Mulyadi, 2013) bahwa sistem pengendalian internal pada dasarnya hanya menyediakan keyakinan yang memadai dan bukan memberikan keyakinan mutlak, karena sistem pengendalian internal yang didesain dan diimplementasikan dalam setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Beberapa keterbatasan bawaan yang terkait dalam setiap sistem pengendalian internal dapat berupa: godaan, konspirasi, kolusi, kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan dalam mempertimbangkan sesuatu hal, dan kurangnya kemampuan untuk menganalisis terkait biaya dibanding manfaat. Penyebab lain atas tidak terbuktinya secara empiris hipotesis kedua ini adalah pengelola APB Desa di Kabupaten Kediri merasa kurang mampu melakukan analisis risiko atau kurang peduli terhadap hasil identifikasi atas risiko yang akan terjadi. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian (Al-Thuneibat et al., 2015), (Chenhall & Morris, 1986), dan (Azlina & Amelia, 2015).

Hasil analisis data pada pembuktian hipotesis ketiga menghasilkan t hitung sebesar 0,3524 yang berarti lebih besar dari t tabel 1,6598, dan nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,005. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelola APB Desa telah mampu membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatan dalam pelaksanaan anggaran belanja, serta mampu mendisain *Standard Operation Procedure* (SOP) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai guna mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Al-Thuneibat et al., 2015), (Chenhall & Morris, 1986), (Azlina & Amelia, 2015), (Pujiono et al., 2016), dan (Kawedar et al., 2019).

Hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh bahwa t hitung 1,493 lebih kecil dari t tabel 1,6598 dan nilai sig. 0,139 lebih besar dari 0,05. Temuan ini membuktikan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Temuan ini memberikan indikasi bahwa informasi dan komunikasi meskipun memiliki arah hubungan positif namun tidak mampu meningkatkan secara signifikan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri. Terdapatnya kelemahan bawaan dalam sistem pengendalian internal yang diimplementasi dalam suatu entitas mengakibatkan suatu sistem pengendalian internal tersebut tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai (Mulyadi, 2013). Keterbatasan bawaan ini dapat berupa kurang kompetennya pengelola keuangan desa dalam mendisain sistem informasi pencapaian kinerja, terjadinya kurangnya pemahaman terkait dengan tugas teknis pengelola sehingga mengakibatkan komunikasi yang kurang efektif, dan penyampaian informasi penting kepada pegawai dan perangkat lainnya yang kurang jelas. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian (Al-Thuneibat et al., 2015), (Azlina & Amelia, 2015), dan (Kawedar, Handayani, & Purwanto, 2019).

Hipotesis kelima yang menyatakan monitoring berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa tidak didukung data empiris dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung 0,560 lebih kecil dari t tabel 1,6598 dan sig. 0,577 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa monitoring meskipun memiliki sifat hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa belum mampu secara memadai untuk merumuskan strategi pemantauan berkelanjutan dalam rangka menciptakan suatu mekanisme monitoring yang seharusnya dilakukan secara rutin, belum dilakukannya evaluasi pengendalian internal dalam rangka mengurangi kelemahan kelemahan yang melekat pada sistem pengendalian internal itu sendiri sebagai akibat dari adanya kelemahan bawaan (Mulyadi, 2014), dan belum tersedianya suatu SOP yang menyangkut mekanisme tindak lanjut temuan audit/review. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian (Al-Thuneibat et al., 2015), (Azlina & Amelia, 2015), dan (Kawedar, Handayani, & Purwanto, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat dua variabel independen yaitu lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang masing-masing secara

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri. Adapun variabel Penilaian risiko, penilaian risiko, dan monitoring, masing-masing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri. Dan, secara simultan variabel lingkungan pendendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan APB Desa di Kabupaten Kediri.

Saran

Bagi pengelola keuangan desa dalam hal ini APB Desa hendaknya melakukan evaluasi secara berkelanjutan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Peningkatan fungsi sistem pengendalian intern agar menjadi lebih baik dan dapat diandalkan dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas atau kompetensi para pengelola APB Desa. Adapun bagi peneliti, penelitian ini layak untuk ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya dengan mengembangkan dan memperbaiki pertanyaan/ pernyataan dalam instrumen penelitian agar dapat diperoleh data lengkap dan akurat dengan memperhatikan kearifan local daerah/desa masing-masing. Demikian juga untuk penelitian berikutnya, disarankan memasukkan atau menambah variabel yang dianggap relevan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan APB Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thuneibat, A. A., Al-Rehaily, A. S., & Basodan, Y. A. (2015). The impact of internal control requirements on profitability of Saudi shareholding companies. *International Journal of Commerce and Management*, 25(2), 196–217. <https://doi.org/10.1108/IJCOMA-04-2013-0033>
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- Azlina, N., & Amelia, I. (2015). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 32. <https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1409>
- BPKP. (2016). *Modul Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Chenhall, R. H., & Morris, D. (1986). The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on the Perceived Usefulness of Management Accounting Systems. *Source: The Accounting Review*, 61(1), 16–35. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/247520> <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>
- Davis, J. H., David Schoorman, F., Donaldson, L., Albanese Tina Dacin Ira C Harris Davis, R. M., & Reply, D. (1997). Davis, Schoorman, and Donaldson Reply: The Distinctiveness of Agency Theory and The Academy of Management Review. *Source: The Academy of Management Review Introduction*. In S. Zukin & P. DiMaggio, 22(3), 611–613. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/259407> <http://about.jstor.org/terms>
- Ghozali, I. L. (2015). *Partial Least Squares, konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program Smartpls 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ishak, S., Nor, M. N. M., Shuib, M. S., Osman, A. F., & Saad, R. A. J. (2019). Corporate governance practice, risk management and internal control at Kedah State Zakat Board (LZNK). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(2), 389–404.
- Jokipii, A. (2010). Determinants and consequences of internal control in firms: A contingency theory based analysis. *Journal of Management and Governance*, 14(2), 115–144. <https://doi.org/10.1007/s10997-009-9085-x>
- Karlinayani, S., & Ningsih, E. S. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 309–316.
- Kawedar, W., . S., Handayani, R. S., & Purwanto, A. (2019). Good Governance, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kinerja Keuangan Organisasi Sektor Publik. *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan*

- Kewirausahaan*, 13(2), 214. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2019.v13.i02.p09>
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Moedarlis, F. T. (2016). Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa, 1–17.
- Moeller, R. R. (2013). Implementing the Revised COSO Internal Control Framework. In *Executive's Guide to COSO Internal Controls* (pp. 293–296). <https://doi.org/10.1002/9781118691656.ch20>
- Mulyadi. (2013). *Auditing: Pendekatan Terpadu. Salemba Empat* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Muraleetharan, P. (2011). Internal control and impact of financial performance of the organizations (special reference public and private organizations in Jaffna district). In *International Conference on Business & Information [C/OL]*. (pp. 1–14). Retrieved from <http://repository.kln.ac.lk/25/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018).
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provins. *Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen*, 10(1), 68–81.
- Rahmawati, D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2005), 8–17.
- Rija, M., & Ernesto Rubino, F. (2018). The Internal Control Systems Integrated into the Various Profiles of Governance, Audit, Risk and Compliance. *International Journal of Business and Management*, 13(5), 21. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n5p21>
- Stanbury, W. T. (2003). Accountability To Citizens In The Westminster Model Of Government : More Myth Than Reality. *Fraser Institute Digital Publication*, (February), 1–62.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1–18.